Journal of Regional Economics
Vol. 07, No. 01 April (2026), pp. 25-36
ISSN:2775-6513

PENGARUH UPAH MINIMUM, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DKI JAKARTA

Ainun Ridhayani[1], Baso Iwang[2], Sitti Aisyah[3], Bustan Ramli[4]
Email: baso.iwang@uin-alauddin.ac.id

[1,2,3,4]Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Minimum Wage, Human Development Index (HDI), and Unemployment Rate on Income Inequality in DKI Jakarta during the period 2005–2025. This research employs a quantitative approach using secondary time series data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and other relevant institutions. The analytical method used is multiple linear regression with the assistance of EViews 13 software. The results show that the Minimum Wage has a positive and significant effect on income inequality, while the Human Development Index has a negative and insignificant effect, and the Unemployment Rate also has a negative and insignificant effect on income inequality. Simultaneously, the independent variables influence income inequality in DKI Jakarta. The findings suggest that increases in minimum wages tend to be more beneficial to formal-sector workers, thereby potentially widening income disparities. Meanwhile, improvements in human development and changes in unemployment rates have not yet significantly contributed to reducing income inequality. Therefore, the government is recommended to formulate a more equitable wage policy, improve the quality of human resources through education and health services, and expand employment opportunities to achieve a more balanced income distribution in DKI Jakarta.

Keywords: Income Inequality, Minimum Wage, Human Development Index, Unemployment Rate.

ARTICLE INFO

Received: 23/02/2026
Accepted: 13/03 2026
Online: 09/04/2026

*Correspondence: Baso Iwang
E-mail: baso.iwang@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di DKI Jakarta. Data yang digunakan merupakan data sekunder time series periode 2005-2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews 13.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan, serta Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta. Secara simultan, variabel Upah Minimum, IPM, dan Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Peningkatan upah minimum cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan karena manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh pekerja sektor formal

dibandingkan sektor informal. Sementara itu, peningkatan kualitas pembangunan manusia dan perubahan tingkat pengangguran belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk merumuskan kebijakan upah yang lebih merata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta memperluas kesempatan kerja guna mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata di DKI Jakarta.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran.

Pendahuluan

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang masih menjadi perhatian utama di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Ketimpangan pendapatan menunjukkan adanya perbedaan distribusi pendapatan yang diterima oleh kelompok masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan kesejahteraan. Tingkat ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif, menurunkan kualitas hidup masyarakat, serta memicu berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan menjadi salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah maupun negara (Christono, 2023).

Di Indonesia, ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama di daerah perkotaan yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi tinggi seperti DKI Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi nasional, DKI Jakarta memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari nilai rasio gini yang cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (BPS, 2025).

Menurut teori Kuznets, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan membentuk pola kurva U terbalik (inverted-U). Pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat akibat terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Namun, pada tahap pembangunan yang lebih maju, ketimpangan pendapatan akan menurun seiring dengan meningkatnya kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan ekonomi. Teori ini menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan bagian dari proses pembangunan ekonomi yang perlu dikelola melalui kebijakan yang tepat (Kuznets, 1955).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah upah minimum. Upah minimum merupakan standar upah terendah yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak. Kebijakan upah minimum diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Namun, dalam praktiknya, kenaikan upah minimum tidak selalu berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan karena manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh pekerja sektor formal dibandingkan pekerja sektor informal yang jumlahnya cukup besar di DKI Jakarta. Akibatnya, peningkatan upah minimum berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat (Firdaus et al., 2021).

Selain upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi faktor penting yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan,

dan standar hidup layak. Peningkatan IPM mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu, semakin tinggi IPM diharapkan mampu mendorong pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di masyarakat (Putri & Susilowati, 2024).

Faktor lain yang turut memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja namun sedang aktif mencari pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan sehingga berpotensi meningkatkan kesenjangan ekonomi. Sebaliknya, penurunan tingkat pengangguran dapat meningkatkan kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik sehingga dapat mendorong pemerataan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pengangguran sering digunakan sebagai salah satu indikator penting dalam analisis ketimpangan pendapatan (Filiasari, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di DKI Jakarta periode 2005–2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi pembangunan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Data dan Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena pelaksanaannya meliputi analisis data dan interpretasi data yang diperoleh. Data kuantitatif yang digunakan berbentuk data time series. Demi mendukung pengolahan data, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi, yaitu dari website resmi, jurnal ilmiah, Badan Pusat Statistik, Transparency International Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini menggunakan pendekatan kuadrat terkecil (Ordinary Least Square). Teknik analisis regresi linear berganda ini berfungsi untuk mengidentifikasi bagaimana variabel dependen (Y) mengalami perubahan akibat pengaruh variabel independen (X) yang telah ditentukan. Dengan demikian, perubahan pada variabel terikat dapat diukur seiring dengan perubahan variabel bebas. Secara umum, analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 LnX_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$

Dimana Y adalah ketimpangan pendapatan (Rasio Gini), X_1 adalah upah minimum, X_2 adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), X_3 adalah tingkat pengangguran, β_0 adalah konstanta, β_1 hingga β_3 adalah koefisien regresi masing-masing variabel, dan e adalah error term.

Penelitian ini menggunakan beberapa pengujian, yaitu uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data layak digunakan, yang terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas, serta pengujian lain seperti analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t) untuk melihat keterkaitan antarvariabel, uji simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi.

ICOR: Journal of Regional Economics
Vol. 07, No. 01 April (2026). Pp 25-36

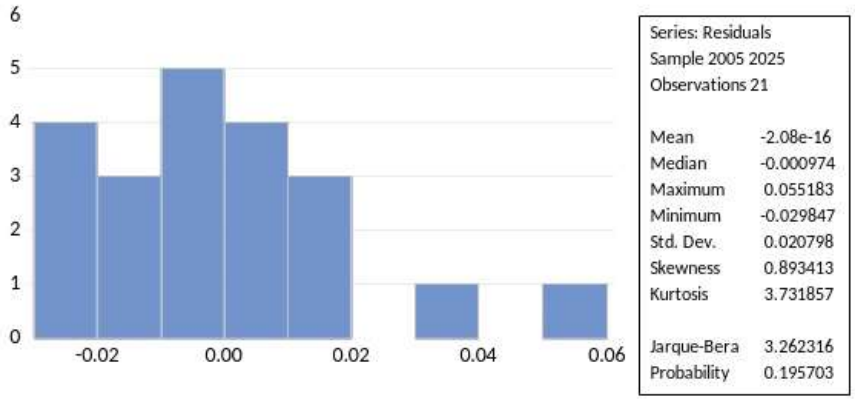
Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Pengujian

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan langkah kunci dalam analisis regresi linear berganda. Uji ini bertujuan untuk menilai kelayakan model dan menentukan apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda.

Uji Normalitas



Gambar 1: Uji Normalitas (JB Test)

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Gambar 1 menunjukkan hasil uji normalitas dengan JB Test. Diketahui bahwa nilai probability JB yaitu 0,195703 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antarvariabel independen. Ketentuan dalam uji ini adalah jika nilai Centered VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF kurang dari 10, model dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
C	NA
Upah Minimum (X1)	2.626006
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	1.029142
Tingkat Pengangguran (X3)	2.646493

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai Centered VIF untuk seluruh variabel independen berada di bawah 10, yaitu upah minimum sebesar 2,626006, IPM sebesar 1,029142, dan tingkat pengangguran sebesar 2,646493, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini bebas dari masalah multikolinearitas.

ICOR: Journal of Regional Economics
Vol. 07, No. 01 April (2026). Pp 25-36

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser. Ketentuan dalam pengujian ini adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas; sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Obs*R-squared	Prob. Chi-Square(3)
2.151069	0.5417

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Berdasarkan Tabel 2, nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,5417 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan pengujian Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Ketentuan dalam pengujian ini adalah jika nilai probabilitas F-statistic lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat autokorelasi; sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dalam model regresi terdapat autokorelasi. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	Prob(F-statistic)
1.626244	0.213286

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Berdasarkan Tabel 3, nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0,213286 > 0,05, yang berarti bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis sejauh mana variabel independen, yaitu upah minimum (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), dan tingkat pengangguran (X3), memengaruhi variabel dependen, yaitu ketimpangan pendapatan (Y).

Tabel 4: Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta (C)	-0.118017	0.205867	-0.573271	0.5740
Upah Minimum (X1)	0.035646	0.012183	2.925953	0.0094
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	-0.00000084	0.00000297	-0.282147	0.7812
Tingkat Pengangguran (X3)	-0.000129	0.003643	-0.035472	0.9721

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4, diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$Y = -0.118017 + 0.035646\ LnX1 + (-0.00000084\ X2) + (-0.000129\ X3) + e \quad (2)$$

Nilai konstanta sebesar -0,118017 mengindikasikan bahwa apabila upah minimum, IPM, dan tingkat pengangguran dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai ketimpangan pendapatan berada pada -0,118017. Nilai koefisien X1 (upah minimum) sebesar 0,035646 menunjukkan bahwa apabila upah minimum meningkat sebesar 1%, maka ketimpangan pendapatan akan meningkat sebesar 0,035646, dengan asumsi IPM dan tingkat pengangguran konstan. Nilai koefisien X2 (IPM) sebesar -0,00000084 menunjukkan bahwa apabila IPM meningkat 1 satuan, maka ketimpangan pendapatan akan menurun sebesar 0,00000084, dengan asumsi upah minimum dan tingkat pengangguran konstan. Nilai koefisien X3 (tingkat pengangguran) sebesar -0,000129 menunjukkan bahwa apabila tingkat pengangguran meningkat 1 satuan, maka ketimpangan pendapatan akan menurun sebesar 0,000129, dengan asumsi upah minimum dan IPM konstan.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Hasil koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	Adjusted R-squared
0.579112	0.504838

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Berdasarkan Tabel 5, nilai R-squared sebesar 0,579112 menunjukkan bahwa 57,91% variasi ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, yaitu upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran, sedangkan sisanya sebesar 42,09% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F (simultan) adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Hasil Uji Simultan (Uji-F)

F-statistic	Prob(F-statistic)
7.796946	0.001731

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Hasil uji F menunjukkan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,001731 < 0,05, sehingga upah minimum, IPM, dan tingkat pengangguran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta.

Uji T (Parsial)

Uji T (parsial) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Ketentuan dalam pengujian ini adalah jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05, maka terdapat pengaruh

ICOR: Journal of Regional Economics
Vol. 07, No. 01 April (2026). Pp 25-36

signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil uji T (parsial) adalah sebagai berikut:

Tabel 7: Hasil Uji Parsial (Uji-T)

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
Konstanta (C)	-0.118017	-0.573271	0.5740
Upah Minimum (X1)	0.035646	2.925953	0.0094
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	-0.00000084	-0.282147	0.7812
Tingkat Pengangguran (X3)	-0.000129	-0.035472	0.9721

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Nilai signifikansi variabel Upah Minimum sebesar 0,0094 < 0,05 dan T-hitung sebesar 2,925953 (lebih besar dari T-tabel sebesar 2,110), menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, H1 diterima dan H0 ditolak. Nilai signifikansi variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,7812 > 0,05 dan T-hitung sebesar -0,282147 (nilai absolut lebih kecil dari T-tabel sebesar 2,110), menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, H0 diterima dan H2 ditolak. Nilai signifikansi variabel Tingkat Pengangguran sebesar 0,9721 > 0,05 dan T-hitung sebesar -0,035472 (nilai absolut lebih kecil dari T-tabel sebesar 2,110), menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, H0 diterima dan H3 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil pengujian, variabel upah minimum memiliki koefisien regresi sebesar 0,035646 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0094 < 0,05 dan nilai T-hitung sebesar 2,925953 > T-tabel 2,110, yang menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena kenaikan upah minimum lebih banyak dirasakan oleh pekerja sektor formal yang memiliki pendapatan tetap, sedangkan pekerja sektor informal tidak memperoleh peningkatan pendapatan yang sama. Akibatnya, ketimpangan pendapatan menjadi tidak merata dan kesenjangan pendapatan antarmasyarakat semakin meningkat.

Selain itu, kenaikan upah minimum juga dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja agar biaya produksi tetap stabil. Peningkatan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat. Di DKI Jakarta, tingginya biaya hidup, perbedaan tingkat pendidikan, dan ketidakmerataan kesempatan kerja menjadi faktor yang menyebabkan peningkatan upah minimum justru diikuti oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan (Haerunisa, 2025).

Sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil, pekerja harian, dan usaha mikro, tidak memperoleh perlindungan upah minimum, sehingga kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah semakin terlihat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum perlu diimbangi dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan sumber daya manusia agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata (Wulandari, 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bunga (2026) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum yang tidak diimbangi dengan pemerataan kesempatan kerja dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan antarmasyarakat. Selain itu, penelitian oleh Wulandari (2023) juga menyatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan karena kenaikan upah lebih banyak dirasakan oleh kelompok kerja formal dibandingkan informal.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Feriyanti dan Handayani (2021) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, dengan alasan bahwa kenaikan upah minimum mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja berpendapatan rendah sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata dan kesenjangan pendapatan menurun. Selain itu, penelitian Mer dan Izzati (2025) menyatakan bahwa peningkatan upah minimum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena daya beli masyarakat golongan bawah meningkat.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Rahmi (2022) yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat meningkatkan ketimpangan apabila tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pemerataan kesempatan kerja. Menurut teori pasar tenaga kerja dari Adam Smith, upah minimum ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran tenaga kerja; ketika jumlah tenaga kerja lebih besar dibandingkan kesempatan kerja yang tersedia, maka sebagian masyarakat tidak dapat menikmati peningkatan pendapatan dari kebijakan upah minimum. Sementara menurut pandangan Karl Marx, perbedaan kepemilikan modal dan akses terhadap pekerjaan dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan upah minimum yang tidak disertai pemerataan akses kerja dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin meningkat.

Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui Teori Pasar Tenaga Kerja Dualistik (Dual Labor Market Theory) yang dikemukakan oleh Doeringer dan Piore (1971), yang membagi pasar tenaga kerja menjadi dua segmen, yaitu pasar primer (formal) dengan upah, jaminan kerja, dan jenjang karier yang jelas, serta pasar sekunder (informal) dengan upah rendah, minim perlindungan, dan tingkat perputaran kerja yang tinggi. Kebijakan upah minimum pada dasarnya hanya mengikat pasar primer, sehingga kenaikannya memperlebar jarak pendapatan terhadap pekerja pasar sekunder yang sama sekali tidak tersentuh regulasi tersebut. Selain itu, teori upah efisiensi (efficiency wage theory) yang dikembangkan oleh Solow (1979) dan Shapiro-Stiglitz (1984) menjelaskan bahwa perusahaan formal cenderung membayar upah di atas upah pasar untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas pekerja, sehingga kesenjangan upah antara sektor formal dan informal semakin melebar ketika upah minimum dinaikkan tanpa diimbangi kebijakan perlindungan bagi pekerja informal.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki koefisien regresi sebesar -0,00000084 dengan nilai signifikansi sebesar 0,7812 > 0,05 dan nilai T-hitung sebesar -0,282147 < T-tabel 2,110, yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, peningkatan IPM cenderung diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan, namun pengaruh tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan. Hal ini sejalan dengan teori Kuznets, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mendorong

penurunan ketimpangan pendapatan pada tahap pembangunan yang lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta.

Peningkatan IPM pada dasarnya menggambarkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta memperluas kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan antarkelompok masyarakat, sehingga manfaat pembangunan manusia lebih banyak dirasakan oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Selain itu, tingginya biaya hidup dan perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat di DKI Jakarta menyebabkan peningkatan kualitas manusia belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan secara signifikan. Oleh karena itu, peningkatan IPM perlu diimbangi dengan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata (Ashari et al., 2024).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardiani (2024) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, dengan penjelasan bahwa peningkatan sumber daya manusia dapat membantu menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, penelitian Asman (2024) juga menyatakan bahwa IPM memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan karena peningkatan pendidikan dan kesehatan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fatonah (2024) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan penjelasan bahwa peningkatan kualitas manusia yang tidak merata antarwilayah justru dapat memperlebar kesenjangan pendapatan. Menurut teori pembangunan manusia dari Amartya Sen, pembangunan manusia tidak hanya menekankan pada peningkatan, tetapi juga perluasan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, apabila akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi tidak merata, maka ketimpangan pendapatan masih dapat terjadi di suatu wilayah.

Hasil yang tidak signifikan pada penelitian ini juga sejalan dengan Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) yang dikemukakan oleh Becker (1964) dan Schultz (1961), yang menyatakan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan baru akan menghasilkan penurunan ketimpangan pendapatan apabila disertai oleh ketersediaan lapangan kerja yang mampu menyerap sumber daya manusia yang lebih berkualitas secara merata. Apabila pertumbuhan IPM tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang sepadan, manfaat peningkatan modal manusia hanya akan dinikmati oleh kelompok masyarakat yang telah memiliki akses ekonomi lebih baik, sehingga dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan secara agregat menjadi tidak signifikan. Kondisi ini juga sejalan dengan model pertumbuhan Solow yang diperluas (augmented Solow model), yang menekankan bahwa modal manusia hanya akan mendorong pemerataan pertumbuhan apabila terjadi difusi teknologi dan kesempatan kerja yang merata antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

ICOR: Journal of Regional Economics
Vol. 07, No. 01 April (2026). Pp 25-36

Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil pengujian, variabel tingkat pengangguran memiliki koefisien regresi sebesar -0,000129 dengan nilai signifikansi sebesar 0,9721 > 0,05 dan nilai T-hitung sebesar -0,035472 < T-tabel 2,110, yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta. Artinya, peningkatan tingkat pengangguran cenderung diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah pengangguran belum mampu memberikan dampak yang besar terhadap perubahan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta, karena sebagian masyarakat yang tidak bekerja di sektor formal masih memperoleh penghasilan dari sektor informal, seperti perdagangan kecil, jasa, dan usaha mandiri, sehingga tetap memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tingkat pengangguran yang terjadi di DKI Jakarta dipengaruhi oleh tingginya jumlah penduduk usia kerja dan persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Akan tetapi, tingginya aktivitas ekonomi di DKI Jakarta membuat masyarakat masih memiliki peluang memperoleh penghasilan meskipun tidak bekerja secara formal. Selain itu, perkembangan sektor informal dan usaha mikro juga membantu masyarakat dalam memperoleh pendapatan, sehingga ketimpangan pendapatan tidak meningkat secara signifikan akibat pengangguran. Apabila tingkat pengangguran terus meningkat tanpa diimbangi dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan masalah sosial dan memperbesar kesenjangan ekonomi di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas sumber daya manusia agar tingkat pengangguran dapat ditekan dan distribusi pendapatan menjadi lebih merata (Emyliana, 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andrianto (2025) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, karena semakin tingginya jumlah masyarakat yang tidak bekerja dapat memengaruhi distribusi pendapatan dalam masyarakat. Selain itu, penelitian Putri (2024) menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena keterbatasan kesempatan kerja menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh pendapatan yang layak.

Sementara itu, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Irawan (2024) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan penjelasan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka kesenjangan pendapatan akan semakin meningkat karena banyak masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan. Menurut teori ekonomi pembangunan dari Arthur Lewis, pengangguran terjadi akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Sementara itu, menurut pandangan John Maynard Keynes, pengangguran dapat terjadi karena rendahnya permintaan terhadap tenaga kerja dalam perekonomian. Oleh karena itu, apabila tingkat pengangguran tidak diatasi melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan investasi, maka ketimpangan pendapatan dapat meningkat karena sebagian masyarakat tidak memperoleh penghasilan secara memadai.

Hasil pengaruh negatif dan tidak signifikan ini juga dapat dijelaskan melalui Hukum Okun (Okun's Law) yang dikemukakan oleh Arthur Okun (1962), yang menyatakan bahwa hubungan antara pengangguran dan output perekonomian bersifat tidak selalu proporsional; pada perekonomian dengan sektor informal yang besar seperti DKI Jakarta, kenaikan pengangguran

terbuka tidak serta-merta menurunkan pendapatan agregat masyarakat karena sebagian tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan formal berpindah ke sektor informal alih-alih menjadi benar-benar menganggur. Selain itu, teori pengangguran struktural menjelaskan bahwa dampak pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan sangat bergantung pada karakteristik pasar kerja setempat; pada kota besar dengan aktivitas ekonomi informal yang tinggi, mekanisme penyerapan tenaga kerja informal berfungsi sebagai katup pengaman (safety valve) yang meredam dampak pengangguran terhadap distribusi pendapatan, sehingga pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan menjadi tidak signifikan secara statistik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara simultan, upah minimum, IPM, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta, dengan kemampuan model menjelaskan 57,91% variasi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan upah yang lebih inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta perluasan kesempatan kerja bagi sektor informal, guna mengurangi ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan di DKI Jakarta. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti kemiskinan, investasi, dan belanja pemerintah, agar analisis ketimpangan pendapatan menjadi lebih komprehensif.

Referensi

Andrianto, B., & Setiawan, E. (2025). Income distribution inequality in Central Java 2020–2024: A panel data analysis of the role of economic growth, education, unemployment, and wages. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(6), 775–785.

Ardiani, D. R. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Wilayah*, 4, 52–62.

Ashari, N. R., Gunawan, S., & Irwan, W. (2024). Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Intelektualita*, 13(2). https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i2.25139

Asman, J. R. (2024). Pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan (JSEP)*, 1(3), 76–83.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Rasio gini Provinsi DKI Jakarta 2025.* BPS Provinsi DKI Jakarta.

Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education.* Columbia University Press.

Bunga, A. (2026). Pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(204), 1228–1247.

Christono, N. A. S. A. (2023). The effect of provincial minimum wages and open unemployment rate on poverty in DKI Jakarta 2016–2023. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 22(2), 1–12.

Doeringer, P. B., & Piore, M. J. (1971). *Internal labor markets and manpower analysis.* D.C. Heath and Company.

Emyliana. (2025). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 1–10.

Fatonah, A. A., & Setiawan, A. F. (2024). Indeks Pembangunan Manusia, dana alokasi umum, dan angkatan kerja. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 87–96.

Feriyanti, N., & Handayani, D. (2021). Pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 145–160.

Filiasari, A. (2021). Pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2002-2019. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10, 1–10.

Firdaus, M. I., Marseto, M., & Sishadiyati, S. (2021). Analisis dampak integrasi ekonomi terhadap FDI di ASEAN. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(9), 1497–1510. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i9.404

Haerunisa, I. (2025). Pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan dan kemiskinan di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi Regional*, 2(11), 240–252.

Irawan, D. (2024). Investasi dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 623–633.

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.

Mer, N., & Izzati, R. Al. (2025). Minimum wage policy and poverty in Indonesia. *The World Bank Economic Review*, 39(1), 191–210. https://doi.org/10.1093/wber/lhae022

Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its measurement and significance. *Proceedings of the Business and Economic Statistics Section, American Statistical Association*, 98–104.

Putri, A. S. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ekonomi Kepulauan*, 7(2), 1–12.

Putri, A. E., & Susilowati, D. (2024). Determinants of the Human Development Index. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 1–15.

Rahmi, J. (2022). Dampak upah minimum terhadap produktivitas tenaga kerja: Studi kasus industri manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 1–12.

Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.

Shapiro, C., & Stiglitz, J. E. (1984). Equilibrium unemployment as a worker discipline device. *The American Economic Review*, 74(3), 433–444.

Solow, R. M. (1979). Another possible source of wage stickiness. *Journal of Macroeconomics*, 1(1), 79–82.

Wulandari, D. A. (2025). Pengaruh upah minimum kabupaten terhadap ketimpangan. *Jurnal Ekonomi Regional*, 3(11), 513–520.

Wulandari, F. (2023). Pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Studi Sosial*, 2(3), 539–549.